

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang dihuni oleh beragam suku, adat, dan latar belakang masyarakat. Salah satu wujud keberagaman itu tampak pada penggunaan nama keluarga atau marga. Nama keluarga tidak hanya menjadi identitas individu, tetapi juga mencerminkan struktur sosial, budaya, serta hubungan kekerabatan. Dalam berbagai budaya, nama keluarga berperan penting dalam menjaga dan mewariskan nilai serta norma tradisional.

Dalam masyarakat Jepang, sistem nama keluarga yang disebut *myōji* (名字) memiliki sejarah panjang. Pada masa Heian (794–1185), penggunaannya hanya terbatas pada kalangan aristokrat dan samurai. Rakyat jelata saat itu tidak memiliki nama keluarga dan hanya menggunakan nama panggilan atau nama kecil. Perubahan besar terjadi pada masa Restorasi Meiji, khususnya setelah Proklamasi Dajōkan Nomor 608 tahun 1870 yang memberi izin masyarakat umum untuk memakai nama keluarga. Kebijakan ini diperkuat dengan Undang-Undang Pendaftaran Keluarga (*Koseki Hō*) tahun 1871, yang mewajibkan seluruh rakyat Jepang mendaftarkan *myōji* mereka sebagai bagian dari reformasi sosial dan administratif menuju negara modern Chapman, (2011).

Myōji dalam masyarakat Jepang tidak sekadar menjadi nama keluarga, melainkan simbol ikatan dengan sejarah keluarga, wilayah asal, dan profesi leluhur. Banyak nama keluarga Jepang yang berasal dari elemen geografis seperti gunung, sungai, atau desa, serta menggambarkan sifat alam atau pekerjaan, seperti *Tanaka* (田中, sawah di tengah), *Yamamoto* (山本, kaki gunung), atau *Kawasaki* (川崎, tepi sungai). Sampai saat ini, *myōji* masih menjadi bagian penting dalam identitas sosial masyarakat Jepang dan tetap digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari birokrasi, pendidikan, hingga pekerjaan. Menurut studi oleh Johnny George

(2023), sistem *myōji* di Jepang memiliki keterkaitan erat dengan struktur masyarakat yang menekankan hierarki, status, dan hubungan kekeluargaan yang terstruktur.

Begitu pula *myōji* di Jepang yang hingga kini masih dipertahankan penggunaannya. Walaupun Jepang telah mengalami modernisasi dan globalisasi yang pesat, sistem *myōji* tetap menjadi bagian penting dalam struktur sosial masyarakat. Penggunaan *myōji* diwajibkan secara hukum dan tercatat dalam dokumen resmi seperti *koseki* (daftar keluarga), ijazah, hingga kontrak kerja. Selain sebagai identitas administratif, *myōji* juga mencerminkan nilai budaya Jepang yang menghargai asal-usul, kesatuan keluarga, dan hierarki sosial. Hingga sekarang, pemilihan nama keluarga tetap memiliki nilai simbolik yang kuat sebagai wujud keterikatan pada tradisi dan leluhur Tanaka, (2017).

Menurut pendapat Siregar & Nadiroh, (2016), di tengah era globalisasi yang dianggap menjadi salah satu yang memudahkan budaya lokal. Karena banyak nilai-nilai barat yang didifusikan ke dalam nilai-nilai lokal salah satu suku di Indonesia yang masih mempertahankan adat istiadatnya adalah suku Batak. Kekeabatan dalam suku Batak dapat dikatakan sebagai yang paling kental dan kuat di antara suku-suku lainnya di Indonesia.

Masyarakat Batak terbagi ke dalam beberapa sub-suku, seperti Toba, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun, dan Angkola. Setiap individu Batak memiliki marga yang diturunkan dari garis ayah Sibarani, (2012). Marga berfungsi sebagai identitas kekerabatan, dasar aturan adat (seperti larangan menikah satu marga), serta berperan dalam sistem sosial dan politik tradisional. Menurut Regina (2025), marga Batak memiliki akar sejarah yang kuat melalui *tarombo* (silsilah), yang menghubungkan seseorang dengan leluhur pertama mereka. Misalnya, marga Nasution berasal dari daerah Mandailing dan memiliki hubungan erat dengan sistem keagamaan dan politik lokal, sedangkan marga Siregar berasal dari wilayah Tapanuli dan dikenal luas di kalangan akademisi dan pemerintahan. Keberadaan marga ini bukan sekedar simbol identitas, melainkan juga penentu hubungan sosial dalam masyarakat.

Pemilihan marga Batak sebagai objek kajian dari Indonesia dalam penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa sistem marga Batak merupakan salah satu sistem nama keluarga yang paling mapan dan masih dijalankan hingga saat ini, dibandingkan dengan suku-suku lain di Indonesia yang lebih banyak menggunakan sistem nama tunggal atau tidak memiliki struktur kekerabatan patrilineal yang jelas Nababan, (1985).

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar tentang asal-usul dan perkembangan sistem marga Batak (*tarombo*) serta nama keluarga Jepang (*myōji*) dalam konteks sosial dan historis masing-masing. Keduanya merupakan sistem penamaan keluarga yang diwariskan secara patrilineal dan berperan penting dalam membentuk struktur masyarakat. Namun, perbedaan sejarah dan latar budaya membuat fungsi dan makna keduanya tidak selalu sejalan. Penelitian ini bertujuan menelusuri bagaimana sistem *tarombo* tumbuh dalam kerangka adat Batak yang kuat, serta bagaimana *myōji* berevolusi dalam sistem sosial Jepang, dari era aristokratik hingga menjadi bagian penting dari sistem negara modern melalui *koseki*. Selain itu, penelitian ini akan membahas secara komparatif perbedaan mendasar antara sistem marga Batak dan *myōji* Jepang, baik dari segi struktur, pewarisan, fungsi sosial, maupun simbolisme budaya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara mendalam, peneliti akan menelusuri marga-marga Batak yang umum digunakan, seperti Simanjuntak, Siregar, dan Nainggolan, serta *myōji* populer di Jepang seperti Sato, Suzuki, dan Takahashi. Penelitian ini juga akan mengkaji tokoh-tokoh yang menyandang nama-nama tersebut untuk melihat bagaimana identitas sosial, nilai budaya, dan peran marga atau *myōji* tercermin dalam kehidupan mereka, baik dalam konteks lokal maupun nasional.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dijawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. (1) Bagaimana asal usul dan perkembangan *myōji* Jepang dan marga Batak (*tarombo*) dalam konteks sosial dan sejarah? (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan sistem *myōji* Jepang dan marga Batak (*tarombo*)? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan dilakukan penelusuran terhadap marga Batak dan *myōji* Jepang yang umum digunakan serta tokoh-tokoh siapa yang menyandang marga dan *myōji* tersebut.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membandingkan sistem kekerabatan melalui penggunaan nama keluarga pada dua budaya yang berbeda, yakni *myōji* Jepang dan marga Batak (*tarombo*), dalam kerangka sosio-kultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap asal-usul, fungsi sosial, serta peran historis dan budaya dari sistem marga dalam membentuk identitas, struktur masyarakat, dan nilai-nilai kekerabatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana sistem penamaan tersebut diwariskan, dipertahankan, dan dimaknai oleh masyarakat masing-masing hingga saat ini.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian budaya, khususnya dalam memperkaya literatur lintas budaya di bidang sastra dan budaya Jepang. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis untuk memahami pentingnya pelestarian budaya melalui sistem penamaan keluarga, serta menjadi landasan bagi penelitian komparatif budaya lainnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kolektif yang terikat dalam sistem kekerabatan, baik dalam konteks lokal Batak maupun internasional Jepang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Historiografi Sistem Penamaan

Dalam kajian historiografi, sistem penamaan dipahami sebagai bagian dari kesadaran sejarah (*historical consciousness*) suatu masyarakat karena menyimpan rekaman perubahan sosial dan struktur kekuasaan dari waktu ke waktu. Bloch (1953) menempatkan nama keluarga sebagai “arsip sosial” yang merekam jejak sejarah kolektif, seperti pola pewarisan, hubungan kekuasaan, dan stratifikasi sosial. Dalam tradisi historiografi modern, sistem penamaan dikaji sebagai sumber sejarah nonmaterial yang memungkinkan penelusuran perubahan jangka panjang (*longue durée*), terutama dalam masyarakat yang menjadikan silsilah dan tradisi genealogis sebagai sarana utama pewarisan sejarah. Oleh karena itu, sistem penamaan tidak dipahami semata sebagai unsur linguistik, melainkan sebagai produk sejarah yang terbentuk melalui dinamika sosial dan politik tertentu, Bloch (1953).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Burke (1997) menegaskan bahwa historiografi sosial perlu memperhatikan praktik keseharian yang membentuk identitas kolektif, termasuk sistem penamaan keluarga. Nama keluarga berfungsi sebagai penanda historis yang menghubungkan individu dengan struktur sosial pada zamannya. Dalam konteks ini, perubahan atau pelestarian sistem penamaan mencerminkan pergeseran relasi kekuasaan serta kebijakan sosial yang berlaku. Dengan demikian, kajian historiografi sistem penamaan berfokus pada proses pembentukan, institusionalisasi, serta perannya dalam membangun kontinuitas dan diskontinuitas sejarah suatu masyarakat.

Dari perspektif sejarah sosial, Bourdieu (1986) memandang nama keluarga sebagai modal simbolik yang berfungsi dalam reproduksi struktur sosial secara historis. Dalam kerangka historiografi, pandangan ini menjelaskan bagaimana sistem penamaan menjadi sarana pewarisan status dan legitimasi sosial lintas generasi. Nama keluarga tidak hanya mencerminkan posisi sosial seseorang pada satu periode tertentu, tetapi juga berperan sebagai mekanisme sejarah yang mempertahankan hierarki sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sistem

penamaan dapat dipahami sebagai bagian dari proses historis yang membentuk dan menjaga tatanan sosial suatu masyarakat.

Secara umum, kajian historiografi sistem penamaan memandang nama sebagai bagian integral dari sejarah sosial dan budaya suatu masyarakat. Dalam perspektif ini, nama keluarga atau marga tidak dipahami sekadar sebagai identitas individual, melainkan sebagai hasil dari proses sosial, politik, dan budaya yang berlangsung dalam rentang waktu panjang. Nama menjadi penanda yang merekam struktur kekuasaan, sistem kekerabatan, serta nilai yang hidup dalam masyarakat pada periode tertentu. Oleh sebab itu, historiografi sistem penamaan menekankan bagaimana praktik penamaan berkembang, berubah, dan dipertahankan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari konstruksi identitas kolektif (Nababan, 1985 & Sibarani, 2015).

Dalam historiografi Jepang, sistem nama keluarga atau *myōji* menunjukkan hubungan erat antara identitas dan struktur sosial. Pada masa Heian hingga Edo, *myōji* hanya digunakan oleh kalangan aristokrat dan samurai sebagai simbol status sosial dan legitimasi politik, sementara rakyat jelata tidak memiliki nama keluarga resmi dan lebih dikenal melalui identitas lokal atau komunal. Perubahan mendasar terjadi pada masa Restorasi Meiji ketika negara Jepang membangun sistem administrasi modern melalui pencatatan keluarga (*koseki*). Kebijakan ini menjadikan *myōji* sebagai identitas wajib seluruh warga negara, sehingga sistem penamaan beralih dari simbol kelas sosial menjadi instrumen negara modern (Chapman, 2011 & Tanaka, 2017).

Berbeda dengan Jepang, historiografi masyarakat Batak menunjukkan bahwa sistem penamaan marga atau *tarombo* telah berkembang dalam kerangka adat dan kekerabatan jauh sebelum adanya intervensi negara modern. Marga Batak berfungsi sebagai penanda genealogis yang menghubungkan individu dengan leluhur pertama serta menempatkan mereka dalam struktur sosial yang jelas. Dalam tradisi Batak, *tarombo* tidak hanya mencatat silsilah keluarga, tetapi juga menjadi dasar legitimasi adat, hubungan sosial, dan pengambilan keputusan dalam komunitas. Dengan demikian, melalui kajian historiografi sistem penamaan, dapat dipahami bahwa baik *myōji* Jepang maupun marga Batak merupakan produk sejarah yang mencerminkan

jalur historis pembentukan identitas dan struktur sosial yang berbeda, meskipun sama-sama bersifat patrilineal (George, 2023 & Tanaka, 2017).

2.1.1 Historiografi *Myōuji* Jepang

Historiografi *myōji* Jepang menunjukkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh struktur politik, sistem kelas, dan reformasi hukum yang membentuk identitas sosial masyarakat. Pada era Heian (794–1185), penggunaan *myōji* hanya terbatas pada kalangan bangsawan (*kuge*) dan pejabat pemerintahan untuk menegaskan garis keturunan serta status sosial. Nama keluarga saat itu berfungsi sebagai legitimasi aristokrasi dan simbol kekuasaan dalam sistem istana, sementara rakyat biasa umumnya tidak memiliki nama keluarga formal dan hanya menggunakan nama pribadi, nama lokasi, atau julukan fungsional Nakagawa, (2019). Memasuki era Edo (1603–1868), penggunaan *myōji* meluas di kalangan samurai, yang menjadikannya identitas kehormatan terkait loyalitas terhadap *daimyo* dan struktur feodal Tokugawa. Namun, rakyat biasa masih dibatasi dalam penggunaan nama keluarga; hanya mereka yang memiliki peran sosial tertentu, seperti pedagang berpengaruh atau pemuka desa, yang dapat menggunakan *myōji* secara tidak resmi, Sugimoto (2010).

Perubahan signifikan terjadi pada era Meiji (1868–1912), ketika pemerintah Jepang melakukan modernisasi besar untuk menyelaraskan struktur sosial dengan standar negara Barat. Pada tahun 1871, melalui kebijakan *Myōji Seido*, pemerintah secara resmi mewajibkan seluruh warga Jepang memiliki nama keluarga. Keputusan ini mengakhiri perbedaan kelas dalam penggunaan *myōji* dan menandai lahirnya identitas nasional yang terstandarisasi serta administrasi kependudukan modern, Nakagawa (2019). Sistem *ie* atau rumah tangga tradisional yang berorientasi patrilineal kemudian diintegrasikan ke dalam hukum keluarga Meiji, menjadikan satu nama keluarga sebagai representasi garis keturunan yang dipertahankan melalui kepala keluarga laki-laki. Kebijakan ini memperkuat fungsi *myōji* sebagai simbol identitas sosial, warisan leluhur, dan struktur kekuasaan keluarga dalam masyarakat Jepang.

Memasuki periode modern dan kontemporer, *myōji* mengalami transformasi seiring perubahan struktur keluarga, mobilitas sosial, dan dinamika hukum yang lebih

egaliter. Meskipun tradisi tetap mewajibkan pasangan menikah menggunakan satu nama keluarga umumnya nama keluarga suami

perdebatan tentang fleksibilitas sistem penamaan terus berkembang, terutama terkait isu kesetaraan gender dan identitas individu, Sugimoto (2010). Selain itu, globalisasi dan perkawinan internasional membawa variasi baru dalam praktik penamaan, termasuk adaptasi ejaan, kombinasi nama asing, serta pengakuan administratif atas perubahan nama. Walau mengalami perubahan, jejak historis dari era Heian hingga modern menunjukkan bahwa *myōji* tetap menjadi elemen budaya penting dalam membentuk identitas, struktur keluarga, dan memori sosial masyarakat Jepang. Perkembangannya mencerminkan transisi Jepang dari masyarakat aristokratik dan feodal menuju negara modern dengan struktur administratif dan budaya yang lebih kompleks, sekaligus menegaskan bahwa nama keluarga berfungsi sebagai representasi sejarah panjang suatu bangsa.

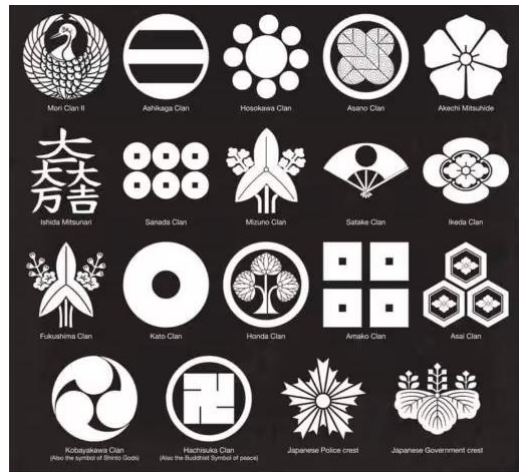
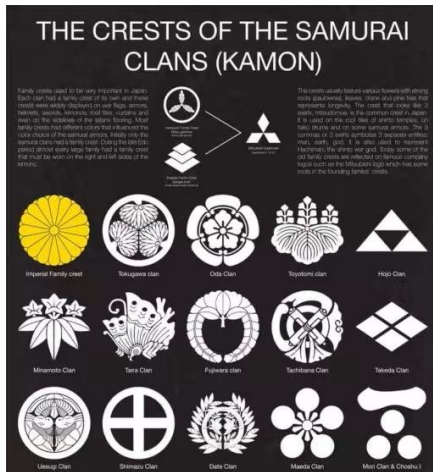
Sebelum sistem nama keluarga (*myōji*) digunakan secara universal di Jepang, masyarakat telah mengenal sistem penamaan yang kompleks secara struktural dan kaya makna simbolik. Pada zaman Yamato dan Nara (abad ke-5 hingga ke-8 M), dikenal struktur sosial dengan istilah *uji* (氏) dan *kabane* (姓). Kedua istilah ini berfungsi menunjukkan garis keturunan, afiliasi politik, serta status sosial seseorang dalam sistem kekaisaran awal Jepang, Farris (1998). Dalam konteks tersebut, *uji* merujuk pada kelompok klan besar yang memiliki hubungan darah atau asal daerah yang sama, sedangkan *kabane* merupakan gelar kehormatan atau status yang diberikan kaisar kepada kepala klan untuk menunjukkan hierarki sosial di istana. Struktur ini berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan dalam masyarakat aristokratik kuno. Namun, sistem *uji-kabane* bersifat sangat eksklusif dan terbatas hanya bagi kalangan bangsawan atau pejabat istana; rakyat biasa tidak memiliki hak untuk menggunakannya atau mewariskannya secara turun-temurun.

Memasuki zaman feodal, khususnya pada masa Edo (1603–1868), sistem sosial Jepang dikendalikan ketat oleh pemerintahan militer Tokugawa yang menerapkan hierarki sosial berbasis kelas (*shi-nō-kō-shō*: samurai, petani, pengrajin, dan pedagang). Menurut Acar (2025), pada periode ini *myōji* (nama keluarga) dan *kamon* (lambang keluarga) berfungsi sebagai simbol status sosial, identitas politik, dan

kehormatan keluarga. Hanya kalangan samurai, bangsawan, dan pejabat pemerintahan tertentu yang diizinkan menggunakan *myōji* secara resmi dalam dokumen negara serta menampilkan *kamon* mereka secara publik. Penggunaan simbol-simbol ini menunjukkan struktur sosial yang sangat hierarkis, di mana identitas keluarga mencerminkan posisi seseorang dalam tatanan kekuasaan feodal.

Salah satu contoh menonjol dari simbolisme ini terlihat pada klan Tokugawa, keluarga yang memerintah Jepang selama lebih dari dua abad. Klan ini menggunakan *kamon* terkenal bernama *mitsuba aoi* (三つ葉葵), yang berarti “tiga daun hollyhock”. Lambang tersebut bukan sekadar representasi visual, melainkan simbol legitimasi kekuasaan politik dan garis keturunan langsung dari dinasti shogun Tokugawa. Penggunaan *kamon* ini diatur ketat; hanya anggota keluarga Tokugawa dan lembaga di bawah perlindungan atau patronasi mereka yang diizinkan menampilkannya. Selain Tokugawa, klan Shimazu dari wilayah Satsuma menggunakan lambang salib dalam lingkaran sebagai simbol kekuatan militer dan semangat kepemimpinan, sedangkan klan Maeda dari Kaga menggunakan lambang bunga plum (*umebachi*) sebagai simbol keanggunan dan loyalitas terhadap keshogunan. Menurut penelitian simbolik budaya Jepang, *kamon* tidak hanya ditampilkan di bendera, perisai, atau peralatan perang, tetapi juga pada pakaian upacara, perabot rumah tangga, dan arsitektur rumah.

Hingga kini, lambang-lambang tersebut tetap digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan atau pemakaman, menjadikannya warisan budaya turun-temurun yang memperkuat identitas keluarga tradisional Jepang. Dengan demikian, *kamon* dapat dipandang sebagai cerminan visual dari sistem sosial Jepang yang berbasis klan dan hierarki, Najita (1987).



Gambar 2.1 Japanese family crests *Kamon*

(Sumber : <https://mai-ko.com/travel/culture-in-japan/crests/japanese-family-crests-kamon-2>)

Gambar di atas menjelaskan sistem simbolik *kamon* sebagai lambang identitas keluarga dalam masyarakat feodal Jepang yang memiliki fungsi sosial, politik, dan kultural penting. *Kamon* digunakan oleh klan samurai untuk menandai garis keturunan, loyalitas, serta status sosial, terutama dalam konteks peperangan, upacara, dan administrasi kekuasaan. Secara visual, *kamon* ditampilkan dalam bentuk hitam-putih yang sederhana, simetris, dan mudah dikenali, mencerminkan kebutuhan praktis di medan perang sekaligus nilai estetika Jepang yang menekankan kesederhanaan dan makna simbolis. Motif yang digunakan, seperti tumbuhan, hewan, bentuk geometris, dan unsur alam, bukan hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga mengandung filosofi yang berkaitan dengan kebajikan samurai, seperti keberanian, kesetiaan, keteguhan, dan keharmonisan dengan alam. Dengan demikian, *kamon* dalam gambar ini dapat dipahami sebagai media visual yang mengintegrasikan identitas keluarga, ideologi *bushidō*, serta struktur sosial Jepang pada masa samurai.

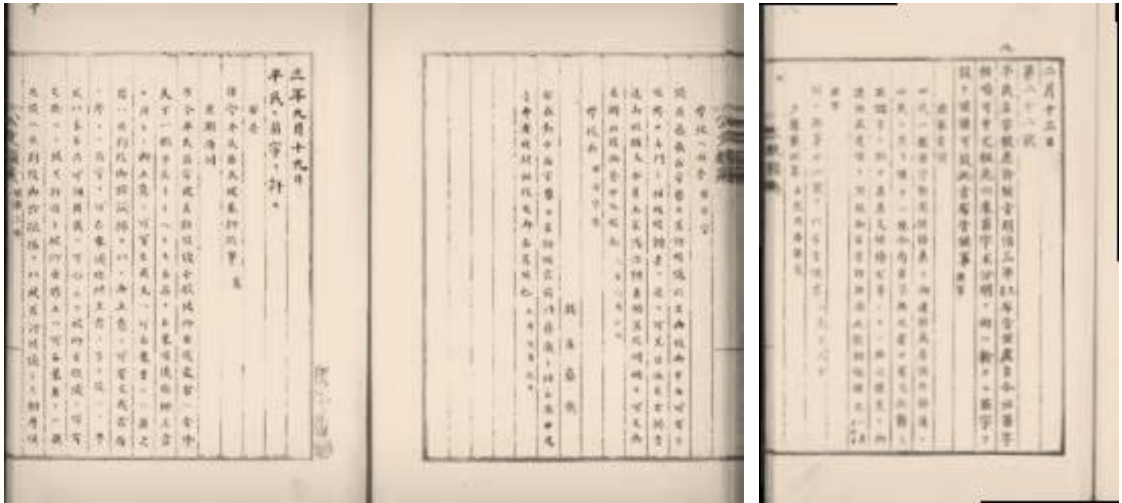
Pada periode Kamakura (1185–1333) dan Muromachi (1336–1573), penggunaan *myōji* mulai meluas di kalangan samurai dan pemilik tanah. Mereka memakai nama keluarga yang diambil dari wilayah kekuasaan atau tempat asal leluhur sebagai tanda identitas dan kehormatan. Menurut Ooms (1996), pola ini menunjukkan bahwa

myōji berfungsi sebagai penanda geografis sekaligus sosial, menghubungkan identitas keluarga dengan tanah yang mereka kuasai. Namun, selama periode Tokugawa, penggunaan *myōji* tetap terbatas secara hukum. Golongan rakyat biasa (*heimin*) tidak diizinkan secara resmi menggunakan *myōji* dalam dokumen negara, meskipun dalam praktik sehari-hari nama tersebut tetap dipakai secara informal di komunitas pedesaan sebagai bentuk identitas lokal, Najita (1987).

Transformasi besar dalam sejarah penggunaan *myōji* terjadi pada masa Restorasi Meiji (1868–1912), ketika Jepang mulai membangun negara modern yang berorientasi pada sistem hukum dan administrasi Barat. Pemerintah Meiji menilai pentingnya pencatatan sipil yang teratur untuk membentuk identitas nasional yang terpusat. Pada 19 September 1870, melalui *Dajōkan Fukoku* Nomor 608, pemerintah memberi izin kepada rakyat biasa untuk menggunakan nama keluarga National Archives of Japan, (2003). Beberapa tahun kemudian, pada 1875, dikeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga Jepang memiliki dan menggunakan *myōji* secara resmi dalam dokumen administrasi.

Chapman (2011) menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Meiji membangun “identitas hukum kolektif” bagi seluruh warga negara Jepang, sehingga setiap individu memiliki status sosial yang setara di bawah hukum negara modern.

Setelah Restorasi Meiji, pemerintah baru mengizinkan rakyat jelata secara resmi menggunakan nama keluarga untuk mewujudkan masyarakat yang setara di antara keempat kelas sosial. Hal ini ditetapkan melalui Proklamasi *Dajōkan* Nomor 608, “Peraturan yang Mengizinkan Penggunaan Nama Keluarga oleh Rakyat Jelata,” yang dikeluarkan pada 19 September 1870 (Meiji 3). Kebiasaan menjadikan tanggal 19 September sebagai “Hari Nama Keluarga” berawal dari penetapan tersebut.



Gambar 2.2 Peraturan yang menjelaskan tentang rakyat biasa yang boleh menggunakan myouji

(sumber: <https://www.archives.go.jp/news/11/anohi.html>: *Heimin Myōji Kyōka Rei*. Tokyo: NAJ Digital Archive.)

Sistem *myōji* kemudian menjadi bagian penting dari sistem keluarga Jepang yang dikenal dengan istilah *ie* (家) dan sistem pencatatan kependudukan nasional *koseki* (戸籍). Sistem *ie* tidak hanya berarti “rumah tangga”, tetapi juga merujuk pada satuan sosial dan hukum yang berlandaskan garis keturunan patrilineal. Dalam sistem ini, kepala keluarga (biasanya laki-laki tertua) memiliki tanggung jawab dan otoritas penuh terhadap anggota keluarga lainnya. Struktur ini menekankan kesinambungan keluarga lintas generasi, di mana nama keluarga (*myōji*), harta warisan, dan tanggung jawab ritual leluhur diwariskan secara turun-temurun, Vogel (1979). Adapun sistem *koseki* (戸籍), yang diberlakukan secara nasional pada 1872, merupakan bentuk registrasi keluarga resmi yang mencatat seluruh informasi dasar mengenai status hukum dan hubungan kekerabatan warga Jepang.

Sistem ini tidak hanya mencatat nama keluarga (*myōji*), tetapi juga data penting seperti kelahiran, pernikahan, adopsi, perceraian, dan kematian. Setiap keluarga memiliki satu *koseki honseki* (本籍) atau “rumah asal keluarga” yang menjadi rujukan administratif bagi identitas hukum seluruh anggota keluarga Miyamoto, Ninomiya, &

Shin, (2011). Penerapan *koseki* merupakan salah satu inovasi hukum paling penting pada masa Restorasi Meiji, karena menandai pergeseran dari sistem identitas berbasis komunitas dan kelas sosial menuju pencatatan yang bersifat individual dan nasional. Melalui *koseki*, pemerintah Jepang dapat memantau populasi, status sipil, dan struktur keluarga dengan lebih efisien. Dalam konteks ini, *myōji* tidak lagi sekadar simbol sosial atau penanda genealogis, tetapi menjadi instrumen administratif yang menghubungkan individu dengan struktur negara modern. Sistem ini memungkinkan negara mengintegrasikan seluruh warga ke dalam satu kerangka hukum yang seragam, sehingga membentuk dasar bagi sistem kependudukan dan kewarganegaraan Jepang modern, Chapman (2011).

戸籍証明書等請求書

本人を確認できるものを
窓口に提示してください。

(宛先)港区長

1 何が必要ですか。

令和 西暦	年 月 日	芝 麻 赤 高 港 台	送信
		時間	

本 籍	港 区	丁 目	番 (地)
筆頭者の氏名			
※ 筆頭者はなくなっても変わりません。			
<input type="checkbox"/> 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)		通	個人事項証明(戸籍抄本)などのとき、記載してほしい方の氏名をお書きください。
<input type="checkbox"/> 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)		通	
<input type="checkbox"/> 除籍全部事項証明(除籍謄本)		通	
<input type="checkbox"/> 除籍個人事項証明(除籍抄本)		通	
<input type="checkbox"/> 改製原戸籍謄本		通	
<input type="checkbox"/> 改製原戸籍抄本		通	
<input type="checkbox"/> 戸籍一部事項証明 除籍一部事項証明		通	
<input type="checkbox"/> 戸籍記載事項証明 除籍記載事項証明		件	
<input type="checkbox"/> 不在籍証明		通	
<input type="checkbox"/> 告知書		通	
<input type="checkbox"/> その他()		通	

2 窓口に來られた方/請求者はどなたですか。

窓口に來られた方	氏 名	電話番号	
	住 所	生年月日	明 昭 西 暦 大 平 年 月 日
	戸籍に記載されている方との関係	<input type="checkbox"/> 本人・配偶者・子・父母・祖父母・孫 <input type="checkbox"/> 代理人 <input type="checkbox"/> その他 ()	

Gambar 2.3 Permohonan Surat Keterangan Keluarga (*Koseki*)

(Sumber: <https://mailmate.jp/blog>)

Selain berfungsi administratif, *koseki* juga memiliki peran ideologis dan sosial yang kuat sebagaimana ditunjukkan pada gambar yang memperlihatkan struktur pencatatan keluarga Jepang. Hal ini menegaskan pandangan tradisional Jepang tentang keluarga sebagai unit sosial yang stabil, hierarkis, dan berorientasi pada kesinambungan garis keturunan. Setiap perubahan status pribadi, seperti pernikahan atau adopsi, wajib dilaporkan secara resmi dan tercatat dalam *koseki*,

sehingga menjadikan nama keluarga (*myōji*) sebagai elemen hukum yang menentukan identitas dan posisi seseorang dalam sistem sosial. Menurut Tanaka (2012), sistem ini memperkuat struktur patriarkal karena hingga kini hukum Jepang tetap mewajibkan pasangan menikah memilih satu nama keluarga yang sama biasanya nama keluarga suami sebagai simbol kesatuan rumah tangga. Aturan tersebut tidak hanya merefleksikan warisan ideologi *ie* (家) yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem hukum modern Jepang masih mempertahankan nilai tradisional dalam struktur keluarga. Dalam konteks ini, *myōji* menjadi lebih dari sekadar nama; ia adalah penghubung administratif dan simbolis antara individu dan struktur negara. Nama keluarga harus tercatat dalam *koseki*, dan setiap perubahan, seperti pernikahan atau adopsi, diatur ketat oleh hukum Jepang. Misalnya, pasangan yang menikah diwajibkan memilih satu nama keluarga yang digunakan bersama (umumnya nama keluarga suami), dan hal ini tercatat dalam *koseki*, Tanaka (2012). Sistem ini mencerminkan warisan struktur *ie* yang tetap bertahan dalam hukum dan kehidupan sosial masyarakat Jepang, meskipun negara telah mengalami modernisasi.

Bahkan hingga kini, *koseki* masih menjadi dasar utama dalam pengurusan administrasi sipil, seperti pembuatan paspor, pengajuan sekolah, atau pembuktian status keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa *koseki* dan *ie* tetap berperan sebagai pilar dalam mempertahankan identitas nasional dan kolektif masyarakat Jepang, menjadikan *myōji* sebagai simbol yang terus hidup dalam sistem sosial maupun hukum Jepang. Dalam konteks masyarakat Jepang modern, sistem *myōji* (nama keluarga) memiliki dimensi historis, sosial, dan identitas yang kompleks. Dari perspektif sosiokultural, *myōji* memiliki makna yang melampaui administrasi. Nama keluarga ini merupakan simbol asal-usul, identitas sosial, dan representasi nilai-nilai keluarga. Nama-nama seperti Sato (佐藤), Suzuki (鈴木), atau Kobayashi (小林), yang kini menjadi nama keluarga paling umum di Jepang, menunjukkan hubungan erat antara penamaan dengan lingkungan geografis serta struktur sosial historis, Reider (2005).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komite Produksi *Roots* berdasarkan statistik pemerintah Jepang dan data direktori nasional per April 2025, setidaknya

ada 500 peringkat nama keluarga nasional yang paling sering digunakan. Sumber tersebut dikutip langsung "Materi referensi: Surname Origin Net", "Dikutip dari Surname Origin Net", "Sumber: Surname Origin Net", dll. Sebagai berikut.

Peringkat	Nama Belakang	Jumlah Populitas
Peringkat 1	Sato	Sekitar 1.813.000 orang
Peringkat 2	Suzuki	Sekitar 1.757.000 orang
Peringkat 3	Takahasi	Sekitar 1.372.000 orang
Peringkat 4	Tanaka	Sekitar 1.302.000 orang
Peringkat 5	Ito	Sekitar 1.045.000 orang
Peringkat 6	Watanabe	Sekitar 1.035.000 orang
Peringkat 7	Yamamoto	Sekitar 1.021.000 orang
Peringkat 8	Nakamura	Sekitar 1.018.000 orang
Peringkat 9	Kobayashi	Sekitar 1.003.000 orang
Peringkat 10	Kato	Sekitar 867.000 orang

Tabel 2.1.Peringkat 10 nama keluarga nasional yang paling sering digunakan
(Sumber : <https://myoji-yurai.net/>)

Fenomena dominasi sejumlah kecil nama keluarga memiliki akar historis pada proses sosialisasi dan kebijakan pemerintah selama masa Restorasi Meiji (1868–1912). Pada masa itu, sistem *koseki* (戸籍) atau catatan keluarga resmi diperkenalkan untuk mencatat nama, status sosial, serta hubungan keluarga secara administratif, Plutschow (1995). Kebijakan ini mewajibkan seluruh warga Jepang memiliki nama keluarga, yang sebelumnya hanya dimiliki kalangan bangsawan dan samurai. Akibatnya, banyak rakyat biasa memilih nama umum seperti Sato atau Suzuki karena kesederhanaan penulisan dan makna filosofis yang dianggap membawa keberuntungan.

Dari perspektif sosiokultural, *myōji* tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal administratif, tetapi juga simbol asal-usul dan kesinambungan generasi. Setiap nama keluarga sering mencerminkan lokasi geografis, profesi nenek moyang, atau nilai tertentu yang diwariskan dalam keluarga. Misalnya, nama Tanaka (田中) berarti

“sawah di tengah,” yang menggambarkan latar agraris masyarakat Jepang pada masa lalu. Fakta ini menunjukkan bahwa struktur sosial Jepang sangat dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dan lingkungan alam, serta nilai harmoni (*wa*) yang menjadi landasan budaya Jepang, Reider (2005).

Lebih jauh lagi, distribusi nama-nama tersebut menunjukkan pola penyebaran yang khas di berbagai wilayah Jepang. Misalnya, nama Watanabe dan Nakamura banyak dijumpai di wilayah Kansai, sementara Sato dan Suzuki lebih dominan di wilayah Kanto dan Tohoku.

Pola persebaran ini berkaitan erat dengan sejarah migrasi dan peranan ekonomi regional di Jepang. Dengan demikian, analisis terhadap peringkat *myōji* tidak hanya memberikan gambaran tentang popularitas nama, tetapi juga menjadi cerminan struktur sosial, mobilitas masyarakat, serta pengaruh sejarah panjang feodalisme terhadap pembentukan identitas keluarga Jepang.

2.1.2 Historiografi *Tarombo* Batak

Historiografi *tarombo* Batak menunjukkan bahwa sistem penamaan berbasis marga telah ada dan berkembang jauh sebelum hadirnya tradisi tulis. Karena itu, sebagian besar sumber sejarahnya berasal dari tradisi lisan, mitologi leluhur, dan pengetahuan adat yang diwariskan turun-temurun. Asal-usul marga Batak umumnya dikaitkan dengan figur leluhur legendaris yang dianggap sebagai pendiri setiap garis keturunan utama, seperti Si Raja Batak, Guru Tatea Bulan, Raja Isumbaon, serta tokoh generasi awal yang membentuk percabangan marga besar, Siahaan (1982). Meskipun tidak semua narasi memiliki bukti historis tertulis, tradisi lisan tersebut berfungsi sebagai fondasi genealogi yang membentuk identitas masyarakat Batak hingga kini. Dalam perkembangannya, marga tidak hanya menjadi penanda keluarga, tetapi juga simbol legitimasi asal-usul, kedudukan sosial, dan hubungan spiritual antara keturunan dengan leluhur. Konsep asal-usul ini memiliki kedudukan penting dalam memahami dinamika budaya Batak.

Mitologi leluhur memegang peran sentral dalam pembentukan *tarombo* karena ia menjelaskan struktur keluarga yang menghubungkan setiap individu dengan leluhur tertinggi. Mitos seperti kelahiran Guru Tatea Bulan dan Isumbaon, serta perjalanan

leluhur di Pusuk Buhit, diceritakan untuk mempertegas hubungan antar-marga dan menjelaskan mengapa beberapa marga memiliki kedudukan tertentu dalam sistem adat, Simanjuntak (2023). Narasi mitologi ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk membentuk rasa kebersamaan. Melalui mitos leluhur, masyarakat Batak memahami peran mereka dalam struktur kekerabatan serta hubungan sakral dengan marga lain. Dalam konteks historiografi, mitologi tidak semata-mata dipandang sebagai cerita tradisional, tetapi sebagai arsip budaya yang menyimpan memori kolektif dan struktur kekeluargaan yang memengaruhi praktik sosial hingga masa modern.

Sistem klan dalam masyarakat Batak kemudian berkembang seiring dengan pertumbuhan populasi dan penyebaran kelompok keturunan ke berbagai wilayah. Marga-marga besar seperti Simanjuntak, Siregar, Nainggolan, Marpaung, dan Panjaitan membentuk sub-marga (anak marga) yang lebih kecil akibat pernikahan, migrasi, dan pembentukan pemukiman baru. Proses ini menciptakan struktur klan yang lebih kompleks, namun tetap berlandaskan prinsip patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah, Situmorang & Limbong (2008). Sistem klan tidak hanya berfungsi sebagai kategori, keluarga tetapi juga sebagai landasan sosial yang mengatur Interaksi sosial, termasuk aturan eksogami marga, pembagian peran dalam upacara adat, serta hubungan antara *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* dalam Dalihan Na Tolu. Historiografi sistem klan ini memperlihatkan bahwa struktur sosial Batak sangat terkait dengan perkembangan generasi, sehingga tarombo menjadi satu-satunya media utama yang mendokumentasikan identitas keturunan tersebut.

Dalam perkembangan sosial masyarakat Batak, *tarombo* mengalami perubahan seiring dengan urbanisasi, pendidikan modern, dan interaksi dengan budaya luar. Meskipun demikian, nilai-nilai keturunan yang tercantum dalam tarombo tetap dijaga sebagai identitas penting yang membedakan masyarakat Batak dari kelompok etnis lainnya. Perubahan sosial memunculkan fenomena baru, seperti pencatatan tarombo secara digital, penyusunan buku silsilah keluarga modern, serta penguatan kembali pemahaman marga dalam komunitas diaspora Batak, Hutagalung (2020).

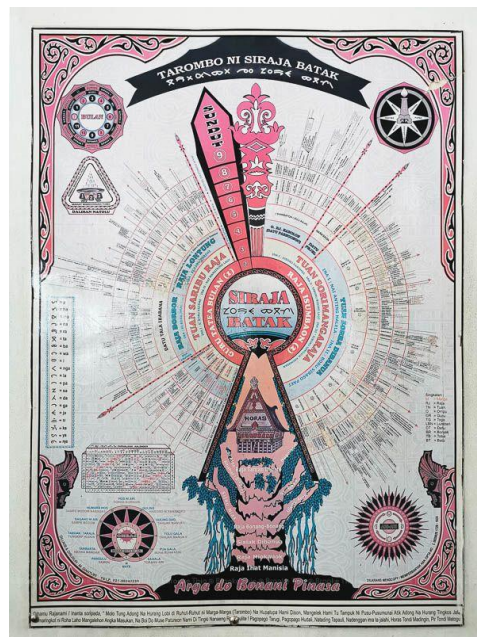
Transformasi ini menunjukkan bahwa tarombo bukanlah sistem tradisional yang statis, tetapi struktur generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan

zaman sambil mempertahankan fungsi utamanya sebagai penanda identitas, landasan adat, dan memori kolektif masyarakat Batak. Dengan demikian, historiografi tarombo memperlihatkan perjalanan panjang sistem penamaan Batak dari mitologi leluhur hingga menjadi struktur sosial yang relevan dalam kehidupan kontemporer.

Tarombo merupakan sistem silsilah dalam budaya Batak yang berfungsi sebagai penanda identitas, garis keturunan, dan landasan dalam struktur sosial dan adat istiadat (Simanjuntak dalam Sakti Ritonga, 2023). Dalam masyarakat Batak, marga tidak hanya menjadi nama keluarga, tetapi juga menentukan posisi seseorang dalam hubungan sosial, pernikahan, hingga pembagian warisan. Siahaan (2010) menjelaskan bahwa sistem *tarombo* diwariskan secara patrilineal dan memiliki nilai-nilai yang sakral dalam kehidupan adat Batak. Leluhur marga Batak tidak hanya dikenal melalui *tarombo* secara lisan, tetapi juga diabadikan dalam karya tertulis seperti *Leluhur Marga-Marga Batak Dalam Sejarah, Silsilah dan Legenda* karya Drs. Richard Sinaga. Dalam buku ini, Sinaga (1995) menguraikan berbagai cabang marga, mulai dari Siregar, Simanjuntak, hingga Nainggolan, dan menelusuri kisah asal-usul setiap marga melalui legenda Si Raja Batak. Menurut Sinaga (1995), Garapan naratif ini tidak semata-mata mencatat nama dan urutan silsilah, tetapi juga menggambarkan fungsi historis dan simbolik tiap marga dalam memperkuat identitas sosial dan adat istiadat Batak. Sinaga (1995) juga menekankan perlunya pemahaman mendalam akan silsilah agar tradisi *tarombo* dapat diteruskan ke generasi selanjutnya, mencegah hilangnya ingatan kolektif terkait leluhur.

Selain berfungsi sebagai penanda identitas dan garis keturunan, *tarombo* juga berperan penting dalam menjaga struktur sosial masyarakat Batak yang berlandaskan pada prinsip *dalihan na tolu*. Prinsip ini menggambarkan sistem sosial yang menekankan keseimbangan dan saling menghormati antara tiga unsur kekerabatan, yaitu *hula-hula* (pihak pemberi perempuan), *dongan tubu* (saudara semarga), dan *boru* (pihak penerima perempuan). Dalam konteks ini, *tarombo* menjadi rujukan utama untuk menentukan posisi seseorang dalam interaksi adat, silsilah keluarga, terutama dalam acara seperti perkawinan, kematian, dan pesta adat. Sebagaimana dijelaskan oleh Pardede (2017), pengetahuan akan *tarombo*

bukan hanya soal mengenal leluhur, melainkan juga menjadi pedoman moral dan etika sosial yang memastikan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa pemahaman mendalam tentang *tarombo*, tatanan adat Batak dapat kehilangan makna simbolik yang telah diwariskan turun-temurun. Berikut adalah gambar silsilah raja batak.



Gambar 2.4Tarombo Ni Siraja Batak
(Sumber : <https://www.kompasiana.com/>)

Pada gambar dia atas *Tarombo ni Raja Batak* merupakan sistem silsilah keluarga diturunkan dalam masyarakat Batak yang berfungsi sebagai kerangka historis dan kultural untuk menelusuri asal-usul marga-marga Batak hingga kepada leluhur bersama yang dikenal sebagai Si Raja Batak. Tarombo tidak hanya berperan sebagai catatan garis keturunan biologis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mengatur relasi kekerabatan, legitimasi identitas marga, serta tata hubungan adat dalam kehidupan masyarakat Batak. Melalui tarombo, individu dapat mengetahui posisi leluhurnya dalam struktur kekerabatan yang lebih luas, yang selanjutnya

menentukan hak, kewajiban, dan peran sosial dalam sistem adat, termasuk aturan perkawinan dan pelaksanaan prinsip *Dalihan Na Tolu*. Dengan demikian, *Tarombo ni Raja Batak* merepresentasikan perpaduan antara memori kolektif, nilai-nilai kekeluargaan, dan sistem sosial yang diwariskan secara turun-temurun, serta menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan identitas dan struktur budaya masyarakat Batak hingga masa.

Lebih jauh lagi, *tarombo* memainkan peran penting dalam membentuk konsep identitas kolektif masyarakat Batak di tengah perubahan zaman dan modernisasi. Dalam konteks globalisasi, ketika nilai-nilai tradisional sering kali tergerus oleh pengaruh budaya luar, *tarombo* berfungsi sebagai jangkar kebudayaan yang mempertahankan rasa kebersamaan dan keunikan etnis Batak. Hal ini sejalan dengan pandangan Harahap (2020) yang menyatakan bahwa sistem *tarombo* bukan sekadar dokumen silsilah, melainkan representasi memori budaya yang menghubungkan individu dengan komunitas dan leluhur. Oleh karena itu, mempelajari dan mempertahankan *tarombo* dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap homogenisasi budaya global. Melalui pelestarian *tarombo*, masyarakat Batak tidak hanya menjaga sejarah dan identitas mereka, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial antaranggota marga.

Di sisi lain, keberadaan *tarombo* juga memiliki dimensi pendidikan dan spiritual yang mendalam. Dalam pendidikan informal keluarga Batak, anak-anak diperkenalkan pada *tarombo* sebagai bagian dari proses internalisasi nilai budaya. Mereka diajarkan menghormati leluhur dan memahami garis keturunan sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik marga. Siregar (2019) menegaskan bahwa *tarombo* tidak hanya menyimpan informasi keluarga, tetapi juga mengandung filosofi hidup yang menanamkan nilai hormat, kesetiaan, dan kebersamaan. Aspek spiritual ini terlihat dari cara masyarakat Batak memperlakukan leluhur sebagai bagian yang tetap hidup dalam ingatan kolektif. Ritual adat yang melibatkan penyebutan leluhur dalam doa dan upacara menunjukkan bahwa *tarombo* berfungsi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini, memperkuat kontinuitas budaya Batak di tengah dinamika sosial modern.

Selain sebagai sistem marga dan sosial, *tarombo* Batak juga terbentuk secara simbolik melalui ornamen visual yang sarat makna kosmologis dan budaya. Penelitian oleh Dinda Oktovia dkk. (2025) menyoroti filosofi *dalihan na tolu* dalam ornamen Batak. Di sini dijelaskan bahwa bentuk simetris dan pola spiral mencerminkan hubungan tiga entitas kekerabatan, yaitu *hula-hula*, *boru*, dan *dongan tubu*, sebagai simbol keseimbangan sosial dan keberlanjutan tradisi dalam kehidupan komunitas Batak.

Serta juga aspek visual, ornamen dan simbol yang melekat pada rumah adat (*rumah bolon*) maupun perlengkapan adat Batak juga merepresentasikan sistem nilai yang terkait erat dengan konsep *tarombo*. Setiap ukiran, warna, dan pola pada elemen arsitektur memiliki makna filosofis yang menunjukkan posisi sosial dan kekerabatan. Misalnya, motif *gorga simataniari* (matahari) melambangkan kehidupan, kesuburan, dan hubungan antara manusia dengan leluhur yang dipandang sebagai sumber kekuatan spiritual. Menurut Hutagalung (2018), sistem simbolik ini berfungsi sebagai bentuk komunikasi budaya nonverbal yang mentransmisikan nilai-nilai moral dan sejarah antar generasi. Dalam konteks ini, *tarombo* tidak hanya dipahami sebagai struktur keluarga, tetapi juga sebagai bentuk representasi budaya yang menegaskan hubungan manusia Batak dengan alam, leluhur, dan komunitasnya.

Lebih jauh, hubungan antara *tarombo* dan ornamen Batak mencerminkan konsep ilmu alam semesta yang menempatkan manusia sebagai bagian dari tatanan alam semesta. Konsep ini dikenal dengan istilah *banua na tolu*, yakni pembagian alam semesta menjadi tiga lapisan: dunia atas (*banua ginjang*), dunia tengah (*banua tonga*), dan dunia bawah (*banua toru*). Struktur ini paralel dengan sistem *dalihan na tolu* dan memperlihatkan keselarasan antara dunia sosial dan spiritual masyarakat Batak. Sihombing (2021) menjelaskan bahwa setiap unsur visual seperti *gorga ulu paung* atau kepala naga di puncak rumah adat merupakan simbol pelindung yang menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual dan fisik. Dengan demikian, ornamen Batak berfungsi ganda: sebagai elemen estetika dan sekaligus sebagai media ekspresi religio-kultural yang memperkuat kesadaran akan asal-usul dan tatanan leluhur sebagaimana tercermin dalam *tarombo*.

Di sisi lain, proses pelestarian nilai-nilai *tarombo* melalui ornamen tradisional kini menghadapi tantangan modernisasi dan komersialisasi budaya. Banyak generasi muda Batak yang mengenal *gorga* hanya sebagai motif dekoratif tanpa memahami makna filosofis di baliknya. Hal ini sejalan dengan temuan Pasaribu (2022) yang menyatakan bahwa urbanisasi dan perkembangan teknologi telah menggeser cara masyarakat memahami simbol-simbol adat, termasuk peran *tarombo* dalam konstruksi identitas. Untuk itu, revitalisasi makna budaya melalui pendidikan formal dan nonformal menjadi penting agar nilai-nilai dalam *tarombo* dan ornamen Batak tidak hanya dipertahankan sebagai warisan visual, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan yang hidup dan relevan di era kontemporer.



Gambar 2.5 *Gorga* Batak
(<https://www.ebatak.com/tarombo>)

Simbol ornamen pada gambar *Gorga* Batak merupakan salah satu ekspresi visual utama seni dan kosmologi masyarakat Batak Toba yang menghubungkan estetika, spiritualitas, dan fungsi simbolik dalam arsitektur serta kehidupan sosial tradisional. Sebagai ukiran tradisional yang ditemukan pada rumah adat (*jabu ruma gorga*) dan berbagai artefak budaya, *gorga* tidak hanya berfungsi sebagai hiasan ornamentatif, tetapi juga sebagai medium proyeksi makna kosmologis yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam semesta, leluhur, dan kekuatan supranatural. Pola lekuk khas serta penggunaan triwarna (hitam, merah, putih) melambangkan realitas kosmis dan sistem nilai Batak yang kompleks, di mana setiap motif diyakini memiliki

makna perlindungan, kesuburan, dan keseimbangan kehidupan. Selain itu, *gorga* berperan dalam mempertahankan identitas budaya Batak serta menjadi sumber inspirasi seni kontemporer dan desain tekstil, misalnya penerapan motif *gorga* pada busana pengantin yang menegaskan kontinuitas tradisi dalam konteks modern.

Sealain itu juga berfungsi sebagai *mediating artefact* yang menyampaikan nilai-nilai seperti keharmonisan, tanggung jawab, dan rasa memiliki secara visual dan intuitif kepada setiap individu. Simbol ini menampilkan estetika khas *gorga* seni ukiran tradisional Batak yang memadukan unsur geometris, wajah antropomorfik, dan pola spiral yang melambangkan kesinambungan hidup dan hubungan antar generasi. Bagian atas gambar menyerupai tugu atau tonggak leluhur, yang merupakan simbol penghormatan terhadap nenek moyang (*ompu*). Sedangkan bagian bawah memperlihatkan bentuk wajah yang tersenyum atau bersahabat, melambangkan keramahan dan keterikatan sosial dalam struktur marga.

Menurut Pardede (2018), *gorga* berperan sebagai artefak budaya yang membantu masyarakat Batak memahami posisi sosialnya dalam sistem marga dan menjalankan peran adat dengan kesadaran kolektif. Bahkan ketika generasi muda mulai melupakan sejarah lisan, *gorga* tetap menjadi pengingat visual akan pentingnya struktur kekerabatan Batak yang berbasis *tarombo*.

Penelitian antropolinguistik oleh Krista Hutasoit & Flansius Tampubolon (2021) mengungkap bahwa praktik *martarombo* (pengecekan silsilah) masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di Desa Tipang. Meski mengalami penurunan, penelitian ini menunjukkan bahwa memanggil berdasarkan *tarombo* tetap menginspirasi relasi sosial, pengaturan keakraban, dan penghormatan adat membuktikan bahwa *tarombo* berfungsi sebagai sistem norma budaya yang hidup. Di sisi lain, jurnal JECCO menyoroti bahwa *martarombo*, praktik aktif mengecek silsilah sebelum berinteraksi, juga mulai luntur di kalangan generasi muda, yang menyebabkan melemahnya solidaritas sosial dan berkurangnya kesadaran adat, Sihombing dkk (2024).

Lebih lanjut, Simatupang dkk. (2024) menegaskan bahwa *tarombo* adalah sumber belajar sejarah dan identitas kultural yang sangat relevan dalam pendidikan sejarah lokal. Dengan memegang silsilah keluarga, generasi muda Batak Toba dapat

memahami asal-usul sosialnya, memperkuat kesadaran sejarah, dan menciptakan hubungan emosional dengan leluhur. Hal ini mengukuhkan *tarombo* sebagai basis kohesi komunitas dan pelestarian budaya tradisional.

Dalam buku *Leluhur Marga-Marga Batak dalam Sejarah, Silsilah, dan Legenda* (1995), Richard Sinaga menjelaskan bahwa masyarakat Batak terbagi ke dalam enam kelompok marga utama yang masing-masing memiliki ciri khas bahasa, wilayah, dan kebudayaan yang berbeda, namun tetap berasal dari akar yang sama, yakni tokoh legendaris yang dikenal sebagai Si Raja Batak. Enam kelompok tersebut meliputi: Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Angkola, dan Batak Pakpak (atau Dairi). Masing-masing kelompok ini berkembang dari pusat asal yang sama di wilayah Tapanuli, namun seiring perjalanan waktu mengalami diferensiasi wilayah geografis, adaptasi terhadap lingkungan, serta interaksi dengan budaya luar, sehingga membentuk identitas yang berbeda-beda. Richard Sinaga menekankan bahwa pembagian ini bukan sekadar administratif atau politis, melainkan berkaitan langsung dengan proses sejarah migrasi, penyebaran keluarga besar Si Raja Batak, serta kebutuhan sosial-budaya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lokal. Misalnya, Batak Toba yang berkembang di sekitar Danau Toba memiliki sistem adat yang sangat terstruktur dan bahasa yang khas, sementara Batak Karo yang berada lebih ke utara memiliki pengaruh budaya yang lebih kuat dari wilayah Sumatra Timur dan memiliki sistem kekerabatan yang berbeda, seperti penggunaan istilah “merga” dan sistem kekerabatan.

Asal-usul Si Raja Batak sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Sinaga (1995), bersumber dari tradisi lisan dan legenda kuno yang telah diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Batak. Menurut legenda tersebut, Si Raja Batak merupakan tokoh leluhur yang diyakini hidup di daerah pegunungan Pusuk Buhit, di sekitar Danau Toba, yang dianggap sebagai pusat spiritual dan geografis Batak. Si raja batak digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan supranatural, berwibawa, dan bijaksana, serta menjadi pemersatu bagi kelompok-kelompok awal masyarakat Batak yang tersebar di kawasan pedalaman Sumatra Utara. Dalam kisah turun-temurun, Si Raja Batak diyakini memiliki dua putra utama, yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon, yang kemudian menjadi leluhur dari berbagai marga

besar di Tanah Batak. Dari kedua garis keturunan inilah muncul cabang-cabang marga yang kemudian membentuk struktur sosial dan leluhur masyarakat Batak.

Dalam penjelasan Sinaga, keberadaan Si Raja Batak tidak hanya dipandang secara mitologis, tetapi juga memiliki dimensi historis yang mengandung nilai identitas kolektif. Meskipun bukti arkeologis tentang keberadaannya masih sulit ditemukan, narasi tentang Si Raja Batak memainkan peran penting dalam membangun kesadaran leluhur masyarakat Batak. Harahap (2018) menegaskan bahwa tokoh ini menjadi simbol kesatuan etnis yang menyatukan berbagai subkelompok Batak di bawah satu keluarga yang sama. Melalui *tarombo*, atau silsilah, keturunan dari Si Raja Batak dapat dilacak secara sistematis hingga generasi sekarang, menunjukkan bahwa mitos dan sejarah berpadu dalam pembentukan struktur sosial Batak. Dengan demikian, tokoh Si Raja Batak berfungsi sebagai representasi ideal dari leluhur yang bukan hanya biologis, tetapi juga spiritual dan budaya.

Lebih lanjut, konsep tentang Si Raja Batak juga berhubungan erat dengan pandangan dunia (*worldview*) masyarakat Batak yang memadukan unsur religius dan kosmologis dalam memahami asal-usul manusia. Dalam mitologi Batak, dunia dianggap sebagai tatanan yang diciptakan oleh kekuatan ilahi (*Debata Mulajadi Nabolon*) dan diturunkan kepada manusia melalui garis keturunan para leluhur. Si Raja Batak dalam hal ini menjadi perantara antara dunia spiritual dan dunia manusia, menjembatani hubungan antara keturunan dengan pencipta. Sihombing (2020) menyebut bahwa penghormatan terhadap Si Raja Batak melalui ritual adat, doa, dan penyebutan leluhur dalam acara sakral mencerminkan filosofi Batak yang menempatkan asal-usul sebagai pusat kehidupan sosial. Oleh karena itu, memahami asal-usul Si Raja Batak bukan hanya berarti menelusuri silsilah, tetapi juga memahami cara masyarakat Batak mengartikulasikan identitas, kepercayaan, dan hubungan mereka dengan alam semesta serta leluhur.

Selain itu perbedaan bahasa antar kelompok marga ini bukan hanya pada kosakata, tetapi juga dalam intonasi, tata bahasa dan penyebutan hubungan kekerabatan yang mencerminkan perbedaan struktur sosial dan nilai adat yang berkembang dalam komunitas masing-masing. Misalnya, Batak Angkola dan

Mandailing yang berada di wilayah selatan memiliki struktur adat yang banyak dipengaruhi oleh budaya Minangkabau dan Islam, sementara Batak Simalungun cenderung memiliki struktur adat yang lebih terbuka akibat pengaruh kerajaan-kerajaan lokal dan interaksi dengan etnis Melayu. Pembagian enam marga ini, menurut Sinaga (1995), mencerminkan kesatuan dalam kesatuan. Meskipun berbeda dalam bahasa dan budaya, semua marga Batak tetap terikat dalam satu kesamaan leluhur dan nilai-nilai dasar yang menjunjung tinggi *tarombo* (silsilah), adat, dan penghormatan kepada leluhur. Keragaman tersebut bukan menjadi penghalang, melainkan kekayaan kultural yang menampilkan daya meminjamkan budaya Batak dalam menghadapi zaman, tanpa kehilangan akar identitasnya.

Perbedaan linguistik antar subetnis Batak juga menunjukkan hubungan erat antara bahasa, struktur sosial, dan sistem nilai. Menurut Situmorang (2019), variasi dialek Batak terbentuk dari proses historis yang panjang, di mana interaksi geografis dan sosial memengaruhi perkembangan bahasa di setiap wilayah. Misalnya, masyarakat Batak Karo memiliki sistem linguistik yang menonjolkan pola sapaan yang lebih egaliter, sementara Batak Toba menunjukkan pola komunikasi yang lebih hierarkis, mencerminkan perbedaan dalam tatanan adat dan status sosial. Bahasa menjadi instrumen penting untuk menunjukkan penghormatan, posisi kekerabatan, serta ekspresi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perbedaan bahasa bukan hanya fenomena linguistik, tetapi juga simbol struktur sosial dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Batak. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan Batak memiliki mekanisme internal yang memungkinkan setiap subetnis mempertahankan identitas sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.

Lebih lanjut, integrasi nilai-nilai adat dan bahasa di antara kelompok marga Batak memperlihatkan kekuatan budaya ini dalam menjaga kesatuan identitas di tengah keragaman. Pardede (2021) menjelaskan bahwa sistem *dalihan na tolu* menjadi dasar kesamaan filosofis di antara kelompok Batak yang berbeda bahasa, karena menekankan prinsip keseimbangan dan saling menghormati antar kelompok kekerabatan. Kesadaran I melalui *tarombo* memperkuat hubungan antar marga sekaligus menjadi pengingat bahwa perbedaan dialek, adat, dan ekspresi budaya

tidak memutus tali persaudaraan leluhur. Nilai ini pula yang memungkinkan masyarakat Batak mempertahankan rasa kebersamaan lintas wilayah, bahkan ketika mereka bermigrasi ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan kata lain, pluralitas bahasa dan adat dalam masyarakat Batak tidak menimbulkan fragmentasi, tetapi justru memperkaya ekspresi budaya dan mempertegas identitas kolektif yang bersumber dari satu akar leluhur, yakni Si Raja Batak.

Dari keseluruhan marga tersebut, sama halnya dengan *myōji* di Jepang, marga Batak berfungsi sebagai penanda asal-usul leluhur dan kedudukan sosial dalam komunitas. Namun, berbeda dengan sistem Jepang yang bersifat administratif, *tarombo* lebih bersifat spiritual dan adat. Setiap marga memiliki legenda asal-usul tersendiri yang dikaitkan dengan tokoh leluhur. Misalnya, marga Simanjuntak diyakini berasal dari keturunan Raja Batak yang bermukim di daerah Balige, sementara marga Siregar berakar di wilayah Porsea.

Struktur marga ini juga mengatur pola pernikahan antar-marga, di mana sistem *marhobas* dan *marsibual* (larangan menikah dengan sesama marga) ditegakkan sebagai bagian dari menjaga kemurnian garis keturunan Siahaan, (2016).

Suku Batak, terkenal dengan budaya dan tradisinya yang kaya, memiliki beberapa prominent clans atau marga, masing-masing membawa identitas uniknya sendiri. Sebagai sebuah komunitas yang besar, marga-marga ini memainkan peran penting dalam masyarakat Batak, mempengaruhi segala hal mulai dari struktur keluarga hingga dinamika komunitas.

Dalam masyarakat Batak, sistem *tarombo* (silsilah marga) memiliki peran fundamental dalam membentuk struktur sosial dan identitas kolektif. Berdasarkan data dari laman *Indonesia.go.id* dan artikel Khodijah Siti di *Times Indonesia*, populasi masyarakat Batak mencapai lebih dari 8,4 juta jiwa dengan lebih dari seratus nama marga yang masih aktif digunakan.

Peringkat	Nama Belakang	Jumlah Populitas
Peringkat 1	Simanjuntak	2 juta orang
Peringkat 2	Siregar	1,5 juta orang
Peringkat 3	Hutabarat	1,5 juta orang
Peringkat 4	Pane	1 juta orang.
Peringkat 5	Purba	1 juta orang.
Peringkat 6	Harahap	1 juta orang.
Peringkat 7	Pasaribu	800.000 orang.
Peringkat 8	Pohan	800.000 orang.
Peringkat 9	Manurung	700.000 orang.
Peringkat 10	Hutagalung	700.000orang.

Tabel 2.2 10 Marga Terbanyak yang Sering Digunakan

(Sumber : <https://timesindonesia.co.id/gaya-hidup/464766/10-marga-populer-sekilas-tentang-warisan-budaya-batak>)

Lebih jauh, peringkat marga yang populer juga merepresentasikan dinamika sosial dan persebaran etnis Batak di luar Sumatra Utara. Mobilitas sosial dan urbanisasi menyebabkan penyebaran marga Batak ke berbagai wilayah Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Fenomena ini menjadikan marga tidak hanya sebagai identitas etnis, tetapi juga simbol solidaritas dan kebanggaan budaya. Dalam diaspora Batak, seseorang sering kali tetap memperkenalkan diri berdasarkan marganya, yang menunjukkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan fungsi sosial dari sistem penamaan tersebut, Nainggolan (2019). Dengan demikian, analisis terhadap peringkat marga Batak tidak hanya mengungkap tingkat popularitas nama keluarga, tetapi juga mencerminkan struktur sosial yang kompleks dalam masyarakat Batak. Tarombo berperan sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara identitas individu dan kolektivitas budaya. Dalam konteks kajian lintas budaya, sistem tarombo Batak dan *myōji* Jepang sama-sama menunjukkan bahwa nama keluarga bukan sekadar simbol linguistik, melainkan representasi historis, sosial, dan spiritual yang meneguhkan nilai-nilai leluhur dan kesinambungan budaya.

2.2 Budaya dalam Sistem Penamaan

Sistem penamaan dalam setiap kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas individual, tetapi juga merefleksikan nilai, struktur sosial, dan pandangan dunia yang dipegang oleh masyarakat tersebut. Pada masyarakat Jepang, *myōuji* (nama keluarga) berkembang sebagai representasi status sosial, leluhur, serta posisi keluarga dalam jaringan feodal pada masa lampau. *Myōuji* tidak sekadar label administratif, tetapi manifestasi dari konsep *ie* (家) atau rumah tangga sebagai unit sosial fundamental dalam budaya Jepang. Melalui *myōuji*, kesinambungan garis keturunan dipertahankan, termasuk kewajiban moral dan tanggung jawab antargenerasi. Masyarakat Jepang secara historis memandang *myōuji* sebagai simbol kehormatan dan legitimasi, yang kemudian diperkuat melalui kebijakan negara pada era Meiji ketika sistem registrasi keluarga (*koseki*) distandardisasi. Dalam konteks ini, budaya Jepang membentuk sistem penamaan yang menekankan kesinambungan historis, stabilitas keluarga, serta hubungan hierarkis dalam struktur sosial, sehingga nama keluarga menjadi representasi budaya yang kompleks dan sarat makna.

Sementara itu, dalam kebudayaan Batak, sistem penamaan berbasis marga dan tarombo tidak hanya berperan sebagai identitas keluarga, tetapi juga sebagai struktur budaya yang mengatur hubungan sosial, adat istiadat, serta mekanisme interaksi antar kelompok. Tarombo, yang merupakan catatan silsilah leluhur, menjadi fondasi utama dalam memahami asal-usul marga, hubungan kekerabatan, dan posisi seseorang dalam *Dalihan Na Tolu*, yang merupakan inti dari sistem sosial Batak. Melalui marga, seseorang memperoleh hak dan kewajiban kultural, termasuk dalam konteks perkawinan, ritual adat, dan pembentukan solidaritas sosial. Sistem penamaan ini memperlihatkan bagaimana budaya Batak menjadikan identitas keluarga sebagai landasan dalam membangun hubungan sosial. Sistem ini bersifat setara namun tetap bertingkat. Penamaan tidak hanya menunjukkan identitas seseorang, tetapi juga mengatur cara bersikapnya dalam kehidupan adat. Dengan demikian, baik sistem *myōuji* Jepang maupun marga Batak menunjukkan bahwa penamaan keluarga adalah konstruksi budaya yang memiliki fungsi sosial, historis,

dan spiritual, yang bertujuan menjaga keteraturan, identitas, dan kesinambungan nilai-nilai leluhur dalam masyarakat masing-masing.

2.2.1 Nilai Kolektivitas Jepang dalam *Myōuji*

Nilai kolektivitas dalam masyarakat Jepang tercermin secara kuat melalui sistem *myōuji* atau nama keluarga, yang berfungsi sebagai identitas kelompok yang menempatkan individu dalam struktur sosial yang lebih besar. (Fukutake 2019) Dalam budaya Jepang, identitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh keberadaannya sebagai bagian dari kelompok keluarga (*ie*) yang menjadi unit sosial fundamental. Oleh karena itu, *myōuji* tidak dipahami sekadar sebagai nama administratif, melainkan simbol keterikatan individu dengan keluarga, leluhur, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Konsep kolektivitas ini terlihat pada kuatnya orientasi masyarakat Jepang terhadap keharmonisan kelompok (*wa*) dan nilai kebersamaan yang mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan individu.

Selain sebagai identitas keluarga, *myōuji* berfungsi untuk mempertahankan integritas sistem *ie* atau rumah tangga tradisional Jepang, yang selama berabad-abad menjadi basis organisasi sosial masyarakat (Hamano, 2005). Dalam sistem *ie*, kepala keluarga bertanggung jawab menjaga kehormatan, keberlanjutan, dan reputasi keluarga, sehingga setiap anggota keluarga wajib bertindak selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung bersama. Semua nilai tersebut tercermin pada prinsip bahwa stabilitas keluarga dianggap lebih penting daripada kebebasan individu. Misalnya, keputusan pernikahan, pekerjaan, atau tempat tinggal pada masa pra-modern sering dipengaruhi oleh pertimbangan kolektif demi menjaga kehormatan *myōuji* dan kesinambungan *ie*. Dengan demikian, *myōuji* memainkan peran penting dalam memelihara solidaritas internal keluarga Jepang.

Kolektivitas dalam *myōuji* juga tampak dalam praktik pewarisan nama keluarga yang bersifat patriarkal, di mana nama keluarga diwariskan dari ayah kepada anak. Sistem ini memastikan bahwa satu garis *ie* tetap dipertahankan dan tidak terputus. Dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, adopsi menantu laki-laki (*mukoyōshi*) dilakukan agar keluarga tetap memiliki pewaris *myōuji* dan menjaga

kesinambungan struktur sosial. (Murakami, 2012).Praktik ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan *myōuji* bukan hanya urusan leluhur diwariskan, melainkan juga kewajiban kolektif untuk mempertahankan identitas keluarga. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya nilai loyalitas dan pengorbanan demi keutuhan unit keluarga.

Pada masa modern, meskipun Jepang telah mengalami perubahan sosial signifikan, nilai kebersamaan dalam *myōuji* tetap berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dalam administrasi negara, penggunaan *myōuji* sebagai penanda identitas utama dalam dokumen resmi menunjukkan bahwa individu selalu ditempatkan dalam konteks keluarga sebelum identitas pribadinya. Bahkan dalam kultur organisasi Jepang, penyebutan nama belakang lebih diutamakan dibanding nama depan, menunjukkan penghormatan terhadap identitas keluarga sebagai representasi diri (Sugimoto, 2010). Tren ini menegaskan bahwa meskipun modernisasi membawa pengaruh individualisme, nilai kebersamaan tetap menjadi struktur dasar lembaga sosial dan budaya di Jepang.

Nilai kolektivitas dalam *myōuji* juga berperan penting dalam menjaga kohesi sosial dan keteraturan masyarakat Jepang. Melalui *myōuji*, masyarakat dapat mengidentifikasi hubungan saudara, keluarga, serta status sosial dalam komunitas. Dalam berbagai upacara seperti pernikahan dan pemakaman, *myōuji* digunakan untuk memastikan bahwa setiap individu menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga. ,Yamamoto (2017). Dengan demikian, *myōuji* tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas, tetapi juga sebagai mekanisme integrasi sosial yang mempertahankan nilai harmoni, kesopanan, dan solidaritas dalam masyarakat Jepang. Sistem ini memperlihatkan bagaimana identitas keluarga tetap menjadi fondasi moral dan etis dalam kehidupan sosial Jepang hingga masa kini.

2.2.2 Nilai Adat Dalihan Na Tolu dalam *Tarombo*

Nilai adat Dalihan Na Tolu memiliki hubungan yang sangat erat dengan *tarombo*, sebab keduanya merupakan fondasi utama dalam menentukan struktur sosial dan tata hubungan kekerabatan masyarakat Batak. *Tarombo* berfungsi sebagai catatan leluhur yang menjelaskan asal-usul dan kedudukan setiap individu dalam jaringan marga, sedangkan *Dalihan Na Tolu* mengatur pola relasi sosial berdasarkan posisi leluhur tersebut Nababan, P. W. J. (1985). Dengan memahami *tarombo*, seseorang dapat mengetahui dengan pasti siapa yang menjadi *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*, sehingga relasi adat dapat dijalankan secara tepat. Hubungan ini menunjukkan bahwa *tarombo* bukan hanya arsip sejarah keluarga, tetapi juga perangkat normatif yang memungkinkan Dalihan Na Tolu berfungsi secara teratur dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sistem *Dalihan Na Tolu*, pihak *hula-hula* atau pemberi perempuan memiliki kedudukan tertinggi secara adat dan harus dihormati.² Kedudukan ini hanya dapat ditentukan melalui pengetahuan terhadap *tarombo*, karena garis keturunan menentukan apakah suatu marga menjadi *hula-hula* bagi marga lain. Nababan, P. W. J. (1985). Misalnya, dalam hubungan antara marga Situmorang dan Simanungkalit, *tarombo* menunjukkan garis perkawinan terdahulu yang menjadikan Situmorang sebagai *hula-hula* dalam hubungan adat tertentu. Dengan demikian, nilai "*somba marhula-hula*" tidak dapat dipahami tanpa merujuk pada *tarombo* yang menjelaskan hubungan kekerabatan. Hal ini memperlihatkan bahwa *tarombo* adalah sumber legitimasi untuk menentukan struktur *Dalihan Na Tolu*.

Sementara itu, fungsi *dongan tubu*, yaitu kelompok semarga atau sedarah, dibentuk berdasarkan *tarombo* (Simanjuntak, B.A., 2006). *Dongan tubu* memiliki tanggung jawab mendukung dan membantu sesama anggota marga, terutama dalam ritual adat seperti perkawinan, kematian, dan pembaptisan. Contohnya, dalam pesta adat *ulaon unjuk*, anggota *dongan tubu* wajib hadir untuk memperkuat posisi sosial keluarga yang melaksanakan acara.

Tanggung jawab tersebut tidak muncul secara kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari struktur *tarombo* yang mengikat setiap anggota marga dalam jaringan genealogis yang sama. Dengan demikian, nilai *manat mardongan tubu* hanya dapat berjalan apabila *tarombo* dipahami dan ditaati oleh seluruh anggota marga.

Posisi *boru* atau penerima perempuan dalam *Dalihan Na Tolu* sangat bergantung pada *tarombo*, karena hubungan *boru* ditentukan dari alur perkawinan yang tercatat dalam keturunan keluarga (Siahaan, 1982). *Boru* memiliki peran penting dalam pelaksanaan adat, seperti membawa *ulos*, mengatur logistik pesta, dan menjalankan tugas pelayanan adat lainnya. Misalnya, dalam pesta perkawinan marga Simanjuntak, *boru* dari marga Hutapea bertanggung jawab membantu seluruh rangkaian acara karena *tarombo* menunjukkan hubungan perkawinan generasi sebelumnya. Kehadiran *boru* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga simbolis. Mereka mewakili ikatan hubungan yang dibentuk melalui perkawinan dan diwariskan melalui turunan genealogis. Tanpa *tarombo*, relasi *boru* tidak dapat ditentukan secara akurat dalam adat Batak.

Secara keseluruhan, *tarombo* berfungsi sebagai dasar struktural yang memungkinkan nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* berjalan konsisten dan teratur (Simanjuntak, B.A., 2006). Melalui *tarombo*, masyarakat Batak tidak hanya memahami hubungan genealogis, tetapi juga memaknai nilai etika sosial, seperti hormat kepada *hula-hula*, solidaritas dengan *dongan tubu*, dan tanggung jawab *boru*. *Tarombo* memastikan setiap individu mengetahui posisinya dalam struktur adat, sehingga setiap tindakan adat dilakukan sesuai norma, tidak melanggar tatanan, dan menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, *Dalihan Na Tolu* dan *tarombo* bukanlah dua konsep terpisah, melainkan dua pilar budaya yang saling menopang dalam membentuk identitas, solidaritas, dan tatanan sosial masyarakat Batak.

2.3 Penelitian terdahulu

Kajian mengenai sistem penamaan keluarga telah banyak dilakukan, baik dalam konteks budaya Jepang maupun Batak. Penelitian terdahulu memberikan dasar penting bagi pemahaman tentang fungsi sosial, historis, dan simbolik nama keluarga, meskipun belum banyak penelitian yang mengkaji keduanya secara lintas budaya.

Penelitian Plutschow (1995) berjudul *Japan's Name Culture: The Significance of Names in a Religious, Political and Social Context* membahas secara mendalam sejarah dan fungsi sosial nama keluarga di Jepang. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada masa feodal, *myōji* berfungsi sebagai simbol status sosial dan alat legitimasi kekuasaan, sedangkan pada masa Restorasi Meiji, pemerintah Jepang menggunakan sistem penamaan keluarga untuk menciptakan keseragaman identitas nasional. Kajian ini menegaskan bahwa *myōji* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna budaya dan politis yang mendalam.

Sementara itu, Kawai (2012) dalam artikelnya *The Formation of Japanese Family Names and Their Social Significance* yang diterbitkan di *The Journal of Japanese Studies*, meneliti evolusi *myōji* dari sudut pandang sosiologi budaya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan nama keluarga di Jepang mencerminkan struktur hierarki dan nilai keharmonisan yang menjadi dasar budaya Jepang. Kajian ini memberikan pemahaman bahwa perubahan sistem *myōji* mengikuti dinamika sosial, terutama dalam menghadapi modernisasi dan urbanisasi.

Dalam konteks masyarakat Batak, Simanjuntak (2006) melalui bukunya *Sistem Kekerabatan Batak Toba* menguraikan bahwa *tarombo* berfungsi sebagai catatan genealogis yang tidak hanya menelusuri asal-usul leluhur, tetapi juga mengatur hubungan sosial antarmarga dalam sistem *Dalihan Na Tolu*. Simanjuntak menegaskan bahwa marga memiliki fungsi regulatif, moral, dan sosial yang menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat Batak.

Penelitian lain oleh Hutapea (2018) dalam skripsinya *Tarombo Batak Toba sebagai Sumber Historiografi Lokal* (Universitas Sumatera Utara) meneliti peran *tarombo* sebagai sumber sejarah lokal. Ia menemukan bahwa *tarombo* berperan sebagai arsip sosial yang mendokumentasikan perjalanan leluhur, migrasi, dan penyebaran marga Batak. Melalui pendekatan historiografi, Hutapea menegaskan bahwa sistem

penamaan marga dalam budaya Batak merupakan wujud kesadaran historis dan identitas kolektif yang diwariskan lintas generasi.

Berdasarkan keempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik *myōji* Jepang maupun *tarombo* Batak telah banyak diteliti dalam konteks sosial dan historis masing-masing budaya. Namun, hingga kini belum banyak penelitian yang mengkaji persamaan dan perbedaan antara keduanya secara lintas budaya, terutama dalam kerangka teori sosiologi budaya.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan membandingkan *myōji* Jepang dan *tarombo* Batak sebagai dua sistem penamaan keluarga yang sama-sama mencerminkan struktur sosial, nilai budaya, dan identitas kolektif masyarakat.